

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Budaya Politik**

###### **a. Pengertian Budaya Politik**

Budaya Politik merupakan situasi-situasi yang dapat memberikan corak dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan politik. Budaya politik sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap sistem politik dan struktur politik dalam masyarakat tersebut.

Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam Anggara (2013:109) mengartikan budaya politik merupakan perilaku orientasi yang khusus dari warga negara pada sistem politik dan beragam segmennya, dan perilaku terhadap kontribusi masyarakat yang ada dalam sistem politik. Almond dan Verba memfokuskan kajian budaya politik pada cara alokasi pola-pola orientasi eksklusif dapat memperoleh tujuan politik dalam masyarakat tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:58-59) mendefinisikan budaya politik sebagai keseluruhan dari falsafah-falsafah politik, semacam norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan falsafah hidup pada masyarakat. Budaya politik memfokuskan pada aspek psikologis dari sistem politik, seperti perilaku-

perilaku, sistem-sistem keagamaan, simbol-simbol dari tiap individu-individu, dan dapat berkerja pada seluruh aspek masyarakat, juga cita-cita dari masyarakat. Dengan kata lain budaya politik menjadi aspek penting pada sistem politik, dimana budaya politik dapat merefleksikan aspek subjektif dari sistem politik.

Menurut Sahya Anggara dalam bukunya (2013:110-111) menjelaskan tentang batasan dari konsep budaya politik yang sebagai berikut ;

1. Konsep budaya politik menitikberatkan kepada perilaku non-aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan.
2. Orientasi pada budaya politik yaitu sistem politik, sehingga dialog mengenai budaya politik selalu membicarakan sistem politik.
3. Budaya politik adalah gambaran konseptual tentang komponen budaya politik pada tingkatan massif, atau menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, tidak per-individu.
4. Konsep budaya politik yang mencakup dengan sifat perilaku, dogma, nilai-nilai dan pengetahuan yang dalam seluruh masyarakat, termasuk aspek kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

**b. Orientasi Budaya Politik**

Orientasi muncul dari interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya dalam masyarakat yang akan selalu berkaitan dengan pengetahuan, tata nilai, dan sikap seseorang. Budaya politik menurut Almond dan Verba dengan mengacu kepada Parsons dan Shils mengenai tipe-tipe orientasi, dalam budaya politik terdapat tiga orientasi, sebagai berikut ;

1. Orientasi kognitif, bersifat pengetahuan perihal keyakinan kepada politik, kontribusi, dan seluruh kewajiban juga input dan output dari sistem politik.
2. Orientasi afektif bersifat perasaan atau pandangan atas sistem politik, kontribusinya, para tokoh, dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif bersifat keputusan dan gagasan mengenai objek-objek politik yang menurut lazimnya mengimplikasikan parameter nilai dan kriteria informasi serta perasaan (Anggara, 2013:112).

**c. Tipologi Budaya Politik**

Perilaku politik masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh cita-cita yang akan dicapai saja, namun ditentukan pula oleh keadaan psikologis politik beserta keadaan atau situasi politik yang terjadi saat itu. Maka budaya politik yang terbentuk dalam masyarakat dipengaruhi oleh history sistem politik, sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat, kesuku-an, adat

istiadat, status sosial, dan konsepsi tentang kekuasaan serta hubungan leadership. Gabriel Almond dan Sidney Verba (Anggara, 2013:115-116) mengklasifikasikan budaya politik kedalam empat klasifikasi sebagai berikut;

1. Budaya politik parokial, adalah budaya politik dengan tingkatan partisipasi politik dari masyarakat amat rendah, karena aspek kognitif (seperti kualitas pendidikan masyarakat relatif buruk atau rendah). Tipe budaya politik ini ruang lingkungannya kecil dan sempit. Minimnya pemisahan atau diferensiasi maka dalam budaya politik ini tidak terdapat peranan khusus dan independen.
2. Budaya politik kaula, yaitu budaya politik yang berkembang dalam masyarakat cenderung berkemajuan, secara sosial dan ekonomi, namun masih pasif. Dalam tipe ini sudah ada ketertarikan dan keinsyafan pada sistem politik dari masyarakat. Namun terbatas pada aspek outputnya saja. Pada aspek inputnya masyarakat masih bersifat pasif, masyarakat beranggapan bahwa mereka dalam posisi lemah dalam mempengaruhi sistem politik. Sikap masyarakat ini bersifat patuh dan loyal terhadap output dari sistem.
3. Budaya politik partisipan, adalah budaya politik masyarakat dengan ditandai keinsyafan politik amat tinggi.

pada tipe ini telah terbentuk keinsyafan atau kesadaran politik sepenuhnya, dimana masyarakat menganggap dirinya sebagai aktor politik. Masyarakat bersifat kritis kepada sistem politik dan otoritas yang berkuasa atas masyarakat. serta pada tipe ini masyarakat berperan aktif dalam input dan output dari sistem politik.

4. Budaya Politik Campuran, adalah gabungan dari dua atau lebih budaya politik.

Pada budaya politik campuran Almond dan Verba (1984 : 27) membaginya menjadi tiga tipe budaya politik campuran, diantaranya adalah budaya politik subjek-parokial, budaya politik subjek-partisipan, dan budaya politik parokial-partisipan.

Menurut Sahya Anggara (2013:117) menyebutkan lima faktor yang menyebabkan perbedaan budaya politik antar masyarakat. yang diantara adalah ;

1. Tingkatan dan kualitas pendidikan dari masyarakat.
2. Keadaan ekonomi dari masyarakat.
3. Reformasi politik atau *Political Will* untuk menggunakan sistem yang baik.
4. Penegakan hukum
5. Media komunikasi yang independen.

Kebudayaan sebagai produk cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Kebudayaan sebagai sarana mengekspresikan alam

pemikiran manusia menjadi wujud nyata atau dapat dirasakan. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur pembentuk dari kebudayaan itu, seperti sistem religius, sistem organisasi dan kemasyarakatan, bahasa yang digunakan, kesenian, mata pencarian masyarakat, dan teknologi dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat tersebut (Indirana F , 2019:8-9).

**d. Budaya Politik di Indonesia**

Menurut Sahya Anggara (2013:118-119) mengemukakan bahwa budaya politik di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, kondisi ini membuat budaya politik di Indonesia beragam. Atas dasar itu Sahya Anggara menyebutkan bahwa konstelasi mengenai budaya politik di Indonesia bisa dilihat dengan variabel sebagai berikut ;

1. Konfigurasi subkultur yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan pada gejala pluralisme di Indonesia, dimana disatu sisi menciptakan keberagaman dan keindahan, disisi lainya menciptakan sumber konflik. Maka dari itu pembagunan karakter nasional menjadi solusi untuk terhindar dari konflik.
2. Pada budaya politik di Indonesia, sebagian bersifat parokial kaula dan bagian lainya bersifat partisipan. Hal ini terjadi karena disatu bagian hal ekonomi, sosial, dan tanggung jawab politik, akibat dari tertutup terhadap kebudayaan

luar, dan masih kuatnya pengaruh feodalisme, bapaknisme, dan ikatan primordial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Disatu bagian lainnya adalah kaum elite dari kelompok masyarakat dengan partisipan politik aktif.

3. Ikatan primordial kuat dan berakar dalam masyarakat Indonesia, dapat dilihat dengan indikator seperti sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, puritanisme dan non-puritanisme.
4. Budaya politik di Indonesia cenderung diwarnai sikap paternalistik dan patromonial.
5. Problem hubungan perihal introduksi modernisasi (dengan segala baik dan buruknya) dengan sistem lama yang berakar sebagai tradisi di masyarakat.

Menurut Clifford Geertz dalam buku (Anggara, 2013:116) mengklasifikasikan budaya politik dalam realitas masyarakat Indonesia, menjadi tiga tipe budaya politik, sebagai berikut;

1. Abangan, adalah budaya politik pada masyarakat yang menitikberatkan pada faktor-faktor animisme dan kepercayaan pada roh halus yang mempunyai pengaruh terhadap kehidup manusia. Ciri dari budaya politik ini seperti adanya tradisi selamatan, pada masyarakat petani pada tahun 1960-an, tradisi ini dipercaya bisa mengusir roh-roh halus yang bersifat jahat dan mengganggu manusia.

Pada tahun 1960-an kelompok abangan bergabung kepada partai politik PNI dan PKI.

2. Santri, adalah budaya politik pada masyarakat yang menitikberatkan pada faktor-faktor keagamaan, terutama agama islam yang menjadi agama sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ciri khas budaya politik santri adalah masyarakat sudah mengerjakan ibadah yang berdasarkan syariat islam, masyarakatnya menempuh pendidikan di pesantren, madrasah, atau masjid, dan kelompok masyarakat ini dulu bergabung dengan partai politik Nahdhatul Ulama dan Masyumi, namun sekarang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.
3. Priyayi, adalah budaya politik pada masyarakat yang menitikberatkan pada keagungan kedudukan sosial dalam tradisi masyarakat. Golongan priyayi merupakan kebalikan dari golongan petani, hal ini terjadi karena golongan priyayi distigmakan sebagai golongan atas dalam kelas sosial dan biasanya golongan priyayi bekerja sebagai aparatur negara atau birokrat. Dahulu golongan ini bergabung dalam Partai Nasional Indonsia, dan sekarang golongan priyayi bergabung dalam Partai Golongan Karya.



## 2. Teori Partisipasi Politik

### a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menjadi hal yang bersifat fundamental dalam berjalannya demokrasi di suatu wilayah. Berangkat dari asumsi dasar bahwa yang lebih memahami tentang kebutuhan hidup dan apa yang dianggap baik ataupun buruk bagi diri sendiri adalah orang itu sendiri. Lebih lanjut soal kebaikan bagi dirinya diatur dalam kebijakan politik yang dibuat oleh otoritas masyarakat yang bernama negara, dimana kebijakan politik negara mengatur perihal kehidupan masyarakat negara tersebut, sehingga mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Atas dasar itu warga negara harus menjalankan partisipasi politik secara aktif dalam pembuatan kebijakan politik tersebut. Lebih lanjut Anggara (2013:142) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktifitas warga negara dalam usaha untuk mempengaruhi kebijakan politik. Aktor dari partisipasi politik adalah masyarakat sipil bukan pegawai pemerintahan. Partisipasi politik bersifat sukarela, mobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Berlainan dengan Sahya Anggara, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Budiardjo, 2008:368) dalam karya penelitiannya dengan judul *“No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”* mengatakan bahwa ;

*“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk*

*mempengaruhi pembuata keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal efektif atau tidak efektif. (By political participation we mean activity by private citizens designed to influence goverment decision making. Participation may be indiviual or collective, organized or spontaneous, suistained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective).”*

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson melihat partisipasi politik adalah tindakan empiris dari masyarakat suatu negara dalam rangka mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintahan tanpa peduli tindakan itu berhasil atau tidak mempengaruhi pembuatan keputusan politik, serta memasukan secara eksplisit tindakan mobilasi, ilegal dan kekerasan dalam upaya mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Partisipasi politik warga negara tidak terbatas pada pemilihan pemimpin negara saja, tetapi jauh lebih luas dari itu, partisipasi politik masyarakat mempunyai kemampuan baik langsung ataupun tidak langsung mengontrol pembuatan kebijakan politik pemerintahan. Budiardjo (2008:367) menuliskan dalam buku “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*“ mengatakan bahwa ;

*“Partisipasi politik merupakan suatu tindakan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau*

*lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau anggota gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.”*

Secara umum partisipasi merupakan suatu tindakan atau aktivitas warga negara dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan dua subjek yaitu pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah.

#### **b. Model Partisipasi Politik**

Model partisipasi politik bertumpu kepada aspek rutinitas partisipasi politik pada periode waktu tertentu. Conway dalam (Widjanarko, 2004) mengklasifikasikan mode partisipasi politik ke dalam dua klasifikasi. Pertama, partisipasi politik *Conventional* adalah partisipasi politik yang bersifat klasik atau konvensional serta mengarah kepada aktivitas yang diterima dan sesuai dengan budaya politik yang dominan, seperti pemilu, kegiatan kampanye. Kedua, partisipasi politik *Unconventional* adalah partisipasi politik mengarah kepada aktivitas yang tidak diterima oleh budaya politik dominan, seperti Gerakan Sosial Baru.

#### **c. Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik merupakan wujud nyata tindakan atau kegiatan dari partisipasi politik. menurut Huntington dan Nelson (1994:9-10) bentuk partisipasi politik terbagi dalam beberapa macam klasifikasikan, sebagai berikut ;

1. Kegiatan Pemilihan (*Electoral Activty*) adalah bentuk partisipasi politik bersifat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan. Misalnya pemberian suara, ikut menjadi tim sukses suatu calon, memberikan dana kampanye untu calon, ikut menjadi panitia pemilihan
2. *Lobbying*, adalah bentuk partipasi politik masyarakat sebagai individu atau kelompok untuk menghubungi pimpinan politik atau pejabat negara, tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintahan terkait permasalahan tertentu yang berdampak ke masyarakat
3. Kegiatan Organisasi atau *Organization Activity*, adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dengan ikut terlibat dalam organisasi sosial ataupun politik, misalnya LSM, Ormas, Kelompok Kepentingan, Pers, dan lain-lain
4. *Conctacing*, adalah bentuk partipasi politik masyarakat sebagai individu atau kelompok untuk menghubungi pimpinan politik atau pejabat negara, tokoh politik dalam upaya membangun jaringan kerjasama untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintah
5. Tindakan Kekerasan atau *Violence*, adalah bentuk partipasi politik masyarakat dengan cara tindakan kekerasan untuk

mempengaruhi keputusan politik pemerintahan. Tidakan kekerasan terbangun atas motivasi-motivasi partisipasi yang sangat kuat. Misalnya pembangkangan sipil, huru-hara, revolusi dan pemberontakan terhadap negara.

Menurut Milbrath dan Goel dalam (Anggara, 2013:152) membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk sebagai berikut;

1. Kelompok Apatitis, adalah kelompok yang tidak mempunyai keterarikan terhadap politik dan cenderung menarik diri dari proses politik.
2. Spektor, adalah kelompok yang partisipasi politiknya sebatas memimilih pada pemilihan umum.
3. Gladiator, kelompok ini adalah kelompok komunikator, spesialis mengadakan kontak langsung dengan pejabat pemerintah, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.
4. Pengkritik.

Sedangkan Michael Rush dan Phillip Althoff (Hidayat, 2013) membagi bentuk partisipasi politik kedalam piramida partisipasi politik dimana semakin tinggi partisipasi politik semakin sedikit masyarakat yang berpartisipasi, berikut adalah urutan piramida partisipasi politik dari yang tertinggi;

1. Menempati jabatan politik ataupun administratif.
2. Berusaha mendapatkan jabatan politik ataupun administratif.
3. Anggota aktif organisasi dari politik, partai politik, kelompok penenkan, dan kelompok kepentingan.
4. Anggota pasif dari organisasi politik, partai politik, kelompok penenkan, dan kelompok kepentingan.
5. Anggota aktif organisasi semu politik.
6. Anggota pasif organisasi semu politik.
7. Mengikuti rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain.
8. Mengikuti diskusi politik informal.
9. Voting.
10. Apatis.

**d. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik sebagai tindakan warga negara terhadap fenomena politik dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalamnya, salah satunya sosialisasi politik. menurut Rush dan Althoff (Budiardjo, 2008:407) sosialisasi politik merupakan cara bagi individu sebagai anggota masyarakat tertentu, untuk belajar tentang sistem politik yang berlaku dalam masyarakat. dalam prosesnya sosialisasi politik dapat menentukan pandangan dan respon masyarakat terhadap peristiwa politik yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Myron Weiner (Anggara, 2013:146) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima faktor timbulnya tingkat partisipasi yang tinggi, diantaranya ;

1. Modernisasi, proses modernisasi telah membuat kehidupan masyarakat berubah kearah berkemajuan pada seluruh aspek kehidupan, berubah tersebut membuat semakin banyak tuntutan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kekuasaan politik.
2. Transformasi model kelas sosial.
3. Pengaruh kaum terpelajar dan komunikasi massa modern.
4. Konflik antara kelompok pimpinan politik.
5. Partisipasi pemerintahan berifat luas pada aspek sosial.

Menurut Sahya Anggara (2013:145) menjelaskan bahwa pada realitas yang bersifat empiris, bentuk dari partisipasi politik sangat di pengaruhi beberapa faktor seperti historis, kamajuan negara, tingkatan dan kualitas pendidikan masyarakat, dan tingkat kesadaran bernegara.

## **2. Masyarakat**

### **a. Pengertian Masyarakat**

Secara etimologi masyarakat, dari kata bahasa arab yakni “*musyarak*” dan pada bahasa Inggris berasal dari kata “*society*” dan dari bahasa latin berasal dari istilah “*societas*” yang mengandung arti hubungan persahabatan antar manusia.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang membangun satu sistem bersama, sistem tersebut bisa bersifat semi terbuka ataupun tertutup, dan di dalam masyarakat terjadi interaksi antar anggotanya yang menciptakan hubungan ketergantungan. Lebih lanjut di dalam masyarakat yang terdiri dari sekumpulan manusia yang hidup secara teratur terdapat norma-norma sebagai tata nilai bersama yang mengatur kehidupan bersama. Norma dibedakan menjadi dua yaitu, norma secara tertulis yang berupa undang-undang yang disahkan bersama, dan norma tidak tertulis yang berkaitan dengan penilaian baik dan benarnya di kehidupan masyarakat, yang menjadi pegangan nilai bagi kehidupan masyarakat, seperti adat istiadat, *local wisdom*, dan lain-lain (Indriana, 2019:7).

Menurut Dannerius Sinaga (1988:143) menjelaskan masyarakat merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu kawasan tertentu. Di dalam sekelompok manusia tersebut terbangun hubungan interaksi yang bersifat langsung ataupun tidak langsung sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat sebagai satuan sosial tercipta atas dasar adanya persamaan perasaan, sejarah, politik, dan kesamaan dalam kebudayaan.



**b. Jenis Masyarakat**

Secara umum masyarakat terbagi menjadi dua jenis masyarakat, dimana kedua jenis masyarakat saling mempunyai ciri khas masing-masing. Kedua jenis masyarakat itu adalah masyarakat modern dan masyarakat tradisional atau adat.

1. Masyarakat Modern adalah masyarakat yang tidak lagi mempunyai ikatan terhadap adat-istiadat. Karena adat istiadat menurut masyarakat modern adalah penghambat bagi kemajuan suatu masyarakat, serta masyarakat modern bersifat rasional, terbuka terhadap nilai-nilai baru demi kemajuan masyarakat (Dannerius Sinaga, 1988:156).

Masyarakat modern mempunyai beberapa ciri-ciri, sebagai berikut (Effendy, 1998:93-94) yakni :

- a. Pola interaksi antar anggota masyarakat ditentukan oleh kepentingan pribadi.
- b. Pola interaksi antar anggota masyarakat bersifat terbuka dan anggota masyarakat mempengaruhi satu sama lainnya.
- c. Berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk alat mencapai kemakmuran masyarakat.
- d. Kelas sosial dalam masyarakat ditentukan atas dasar spesialisasi pekerjaan.

- e. Tingkatan dan kualitas pendidikan formal tinggi dan baik serta merata.
  - f. Hukum bersifat hukum tertulis.
2. Masyarakat tradisional mempunyai hubungan erat dengan adat istiadatnya dan terjaga secara turun temurun antar generasi dan cenderung curiga terhadap hal yang baru dan rasional, maka dari itu masyarakat tradisional mempunyai sifat yang kurang kritis terhadap hal baru (Dannerius Sinaga,1988:152).

Menurut Selo Soemardjan (1993:62-68) dalam pandangan sosiologi, masyarakat tradisional mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah ;

- a. Bersifat homogen.
- b. Ikatan kekeluargaan, solidaritas, dan rasa saling percaya masih kuat dalam masyarakat .
- c. Pranta sosial bersifat kolektif.
- d. Sistem adat masih sangat efektif untuk menciptakan kedisiplinan sosial dari masyarakat.
- e. Budaya malu dari setiap warga sebagai kontrol sosial dalam lingkungan sosial, rasa malu apabila melakukan penyimpangan sosial terhadap nilai dan norma yang ada dalam adat istiadat.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan alat perbandingan serta landasan bagi penelitian yang sedang penulis lakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga untuk mendukung ketajaman dari penelitian. Penelitian tentang budaya politik masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainya, diantaranya adalah :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p><b>Nama Peneliti</b></p>    | <p>a. Anggun Aprillia Wardhanie (Universitas Negeri Semarang, 2017).</p> <p>b. Huzer Apriansyah (Universitas Diponogoro, 2005).</p> <p>c. Riza Faisal (Unversitas Pendidikan Indonesia, 2013).</p>   |
| <p><b>Judul Penelitian</b></p> | <p>a. Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Pada Pilkada Langsung 2015.</p> <p>b. Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme (Studi Kasus di Dusun Klopo Duwur Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kadiren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah).</p> <p>c. Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga (Studi Kasus Di Masyarakat Adat</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013).   |
| <b>Fokus Kajian</b>    | <p>a. Penelitian Anggun Aprillia Wardhanie menjelaskan tentang budaya politik masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada langsung 2015.</p> <p>b. Penelitian Huzer Apriyansyah menjelaskan tentang budaya dan perilaku politik pengikut Saminisme di Dusun Klopo Duwur Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kadiren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah</p> <p>c. Penelitian Riza Faisal menjelaskan tentang budaya politik masyarakat kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013.</p> |
| <b>Rumusan Masalah</b> | <p>a. Rumusan masalah dalam penelitian Anggun Aprillia Wardhanie yaitu. Bagaimana budaya politik masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada langsung 2015 ?. Adakah faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat Desa</p>  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>Kebadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada langsung 2015?</p> <p>b. Rumusan masalah penelitian Huzer Apriansyah yaitu. Bagaimanakah tipe budaya dan perilaku politik masyarakat pengikut Saminisme? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya dan perilaku politik masyarakat pengikut Saminisme?</p> <p>c. Rumusan Masalah Penelitian Riza Faisal yaitu. Bagaimanakah orientasi masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 ?. Bagaimanakah orientasi afektif masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013? Bagaimanakah orientasi evaluatif masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013?</p> |
| <p><b>Metodologi Penelitian</b></p> | <p>a. Penelitian Anggun Aprillia Wardhanie menggunakan metodologi kualitatif.</p> <p>b. Penelitian Huzer Apriansyah menggunakan metodologi kualitatif.</p> <p>c. Penelitian Riza Faisal menggunakan metodologi kualitatif.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Hasil Penelitian</b></p> | <p>a. Hasil penelitian Anggun Aprillia Wardhanie menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada langsung 2015 termasuk ke dalam tipe subjek-partisipan menurut teori Gabriel Almond dan Verba. Adapun faktor yang memoengaruhinya adalah pendidikan, media massa, dan imbalan.</p> <p>b. Hasil penelitian Huzer Apriansyah menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat pengikut Saminisme di di Dusun Klopo Duwur Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kadiren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah adalah subjek-parokhial.</p> <p>c. Hasil Penelitian Riza Faisal menunjukkan teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba tidak sesuai dengan masyatakat adat kampung Naga. Budaya politik masyatakat adat kampung Naga adalah budaya politik Kaula. Secara orientasi kognitis masyarakat adat kampung Naga sudah mengetahui sistem politik ( baik input atau output ) walaupun bersifat</p> |
|--|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>pasif, dan mereka juga taat akan kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat adat kampung naga memiliki perasaan khusus terhadap sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat kampung Naga. Dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 masyarakat adat Kampung Naga atas dasar suka terhadap salah satu pasangan calon.</p>  |
| <p><b>Perbedaan Penelitian</b></p> | <p>a. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh Anggung Aprillia Wardhanie dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya dimana fokus penelitian Anggung Aprillia Wardhanie pada budaya politik masyarakat dalam kegiatan Pilkada langsung 2015 sedangkan fokus penelitian penulis pada budaya dan struktur politik masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari masyarakat desa Pasanggrahan yang di dalamnya terdapat komunitas penghayat kepercayaan kepada tuhan.</p> <p>b. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh Huzer Apriansyah dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya dimana fokus</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>penelitian Huzer Apriansyah pada budaya politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik pengikut Saminisme, sedangkan fokus penelitian penulis pada budaya politik budaya dan struktur politik masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari masyarakat desa Pasanggrahan yang di dalamnya terdapat komunitas penghayat kepercayaan kepada tuhan.</p> <p>c. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh Riza Faisal dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitiannya dimana fokus penelitian Riza Faisal pada budaya politik dan orientasi budaya politik masyarakat adat kampung Naga dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, sedangkan fokus penelitian penulis pada budaya politik budaya dan struktur politik masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari masyarakat desa Pasanggrahan yang di dalamnya terdapat komunitas penghayat kepercayaan kepada tuhan.</p> |
|--|---|



### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini menjelaskan sistematika dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe budaya politik dari Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Desa Pesanggrahan Kabupaten Cilacap, dimana Paguyuban ini merupakan paguyuban penganut kepercayaan yang merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan kepada tuhan yang maha esa diluar agama yang diakui oleh negara aliran kepercayaan tidak berupa agama, melainkan suatu kebudayaan nasional. Dalam Paguyuban tersebut terdapat sistem sosial yang mengatur jalanya paguyuban. Dalam kajian ilmu politik masuk subbab kajian budaya politik.

Setelah diketahui budaya politik dari Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah, kemudian dilihat pengaruh dari budaya politik terhadap partisipasi politik dari Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif.

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori budaya politik dan partisipasi politik. Kedua teori tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan judul penelitian dan teori tersebut juga akan digunakan untuk pisau analisis. Penelitian ini lebih melihat bagaimana budaya politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dan pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik dari Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut;

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah telah dibuat dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini hipotesis yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

- $H_a$  Terdapat pengaruh signifikan budaya politik terhadap Partisipasi Politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Desa Pesanngrahan Kabupaten Cilacap.
- $H_o$  Tidak terdapat pengaruh signifikan budaya politik terhadap Partisipasi Politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Desa Pesanngrahan Kabupaten Cilacap.